

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk merupakan salah satu bahan penting yang dibutuhkan untuk tanaman baik perkebunan maupun pertanian, selain itu pupuk menjadi kebutuhan utama bagi petani, karena dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan produksi suatu komoditas. Namun demikian keberadaan pupuk sering menjadi permasalahan bagi petani, dimana kelangkaan pupuk sering menjadi masalah yang dirasakan oleh petani. Apabila dilakukan perbandingan antara tingkat kebutuhan pupuk dan realisasi produksi menunjukkan adanya keseimbangan, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tahun 2021 jumlah kebutuhan pupuk sebesar 12 juta ton, tahun 2022 sebesar 18 juta ton dan tahun 2023 sebesar 13 juta ton. Kebutuhan tersebut seharusnya dapat terpenuhi dengan jumlah produksi pada tahun 2021 mencapai 12,2 juta ton, pada tahun 2022 sebesar 18,84 juta ton dan kapasitas produksi sebesar 13,9 juta ton pada 2023.

Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas selain itu, dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut. Subsidi pupuk juga dimaksudkan untuk merespon kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani (Tiyastuti et al., 2019).

Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input melalui penetapan HET pupuk subsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi terbukti mampu meningkatkan hasil panen dan produksi pertanian nasional. Pupuk bersubsidi sebagai kebijakan yang diberikan pemerintah dengan menetapkan harga eceran tertinggi dengan tujuan agar petani dapat membeli pupuk bersubsidi dibawah harga pasar sehingga dapat meningkatkan hasil produksi serta meningkatkan daya beli agar kesejahteraan petani meningkat (Dwijayanti & Hayati, 2020)

Subsidi pupuk dibutuhkan petani karena pupuk mempunyai peranan yang penting bagi peningkatan produksi pertanian. Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani (Adiraputra & Supyandi, 2021). Dalam penerapan kebijakan pupuk subsidi sendiri, pemerintah beracuan pada asas enam tepat, antara lain tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga. Kebijakan pupuk subsidi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pengusulan oleh pemerintah daerah masing-masing (Oktaviana et al., 2022).

Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton atau meningkat 2 kali lipat dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada tiga jenis, yaitu Urea, NPK, dan yang baru adalah pupuk Organik. Jika dilihat lebih rinci lagi, pupuk urea ditetapkan sebesar 4.634.626 ton, pupuk NPK sebesar 4.415.374 ton termasuk

pupuk NPK Formula Khusus, dan pupuk Organik sebesar 500.000 ton. Alokasi subsidi pupuk di Indonesia tahun 2024 dapat diketahui bahwa provinsi Jawa Timur memiliki proporsi tertinggi dalam alokasi subsidi pupuk. Adapun penyerapan pupuk bersubsidi Jatim per September 2024 sebanyak 1.024.346 ton atau 53% dari alokasi tahun 2024. Rinciannya penyerapan Urea 571.692 ton (58% dari alokasi), NPK 450.150 ton (54%), NPK Kakao 137 ton (14%), dan pupuk organik sebanyak 2.366 ton (2%) (Sah Ikhlas, 2024)

Upaya pemerintah dengan melakukan tata kelola pupuk subsidi yaitu pemerintah menetapkan harga pupuk yang relatif murah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 15/M-DAG/Per/2015 menetapkan peraturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah melalui optimalisasi kinerja KPPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan HET pupuk bersubsidi di wilayahnya. Hal ini diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu)

Permasalahan yang terjadi adalah lambatnya pembagian atau distribusi pupuk sehingga mempengaruhi hasil panen yang diperoleh petani. Adapun

persoalan yang lain yakni tidak adanya kesesuaian Harga Eceran Tinggi (HET). Tingginya harga pupuk yang ada di eceran menjadikan para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkan. Kebijakan pemerintah melalui subsidi pupuk diharapkan mampu melindungi para petani. Petani diberikan subsidi pupuk oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Keluhan petani tentang kelangkaan dan tidak tepat sasaran masih menyertai pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk (Kasiami, 2020). Masih terjadinya antara jumlah pupuk yang disubsidi dengan kebutuhan di lapangan menjadi salah penyebabnya, menjadikan petani memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan mengenai subsidi pupuk.

Presepsi petani terhadap kebijakan subsidi pupuk dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam penggunaan pupuk, yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas dan efisiensi pertanian. Desa Tengkur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu daerah pertanian yang mendapatkan perhatian dalam konteks kebijakan subsidi pupuk. Sebagai daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kebijakan subsidi pupuk memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi petani di desa ini. Namun, belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana petani di Desa Tengkur menyikapi kajian tersebut. Peradaban persepsi antara petani biasa muncul karena berbagai faktor, termasuk pemahaman tentang kebijakan, pengalaman pribadi, dan kondisi ekonomi lokal.

Penelitian ini untuk menggali dan menganalisis persepsi petani dalam menyikapi kebijakan subsidi pupuk di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dengan memahami persepsi petani, diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut dan menemukan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan subsidi pupuk di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan petani lokal. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul: **“Persepsi Petani Dalam Menyikapi Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi petani dalam menyikapi kebijakan subsidi pupuk di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Apa dampak kebijakan subsidi pupuk di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami persepsi petani dalam menyikapi kebijakan subsidi pupuk di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Menganalisis dampak kebijakan subsidi pupuk di Desa Tenggun Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang cara terbaik untuk memanfaatkan subsidi pupuk dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi. Penelitian ini juga dapat membantu petani memahami dampak dari kebijakan subsidi terhadap produktivitas dan kesejahteraan mereka.
2. Menyediakan data dan analisis mengenai efektivitas kebijakan subsidi pupuk di tingkat desa, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan yang lebih baik. rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persepsi Petani

Persepsi petani dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, pemikiran dan pandangan petani terhadap suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan subsidi pupuk. Jadi persepsi petani terhadap pupuk subsidi yaitu tanggapan, pemikiran, dan pandangan petani terhadap pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah

2. Kebijakan Subsidi Pupuk

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

